Optimalisasi Peran PKK Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Komoditas Padi Di Tulang Bawang

Dwy April Cella^{1*}, Erlin Kurniati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRACT

Keywords:

PKK, Rice, Empowerment, Value added

This study aims to analyze the optimization of the role of PKK (Family Welfare Empowerment) in increasing the economic value of rice commodities in Tulang Bawang Regency. Rice is a strategic commodity that supports the local economy; however, the majority of the harvest is still sold as unprocessed unhusked rice, which limits its added value and reduces potential income for farmers. This issue is caused by several factors, including limited access to appropriate processing technology, lack of training in product development, and insufficient market information. Through a qualitative descriptive approach based on literature review and secondary data, this research highlights the important role PKK can play in community empowerment, particularly among women farmers. PKK's involvement includes providing technical skills through training, encouraging entrepreneurship, and strengthening community-based social networks. Empowering PKK is not only essential for capacity building but also acts as a catalyst for local innovation and food processing efforts. The proposed strategies include implementing rice product processing training, enhancing product branding and promotion, establishing marketing networks, and integrating PKK programs into village development plans and local government agendas. The findings show that when PKK functions optimally, it has the potential to develop a household-based agricultural business ecosystem that improves local economic resilience, increases the added value of agricultural commodities, and strengthens food security in a sustainable and inclusive manner.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.

Corresponding Author:

Nama: Dwy April Cella

Email: sisibta19@gmail.com

PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi tetapi juga menyangkut aspek ketahanan pangan nasional. Di Kabupaten Tulang Bawang, *padi* menempati posisi penting dalam struktur ekonomi lokal, terutama sebagai tulang punggung pendapatan masyarakat agraris. Berdasarkan data BPS (2021), luas panen *padi* sawah di wilayah ini mencapai 52.601,29 hektar dengan total produksi sebesar 215.987,34 ton. Meski demikian, produktivitasnya hanya sebesar 44,20 kuintal per hektar, menempatkan Tulang Bawang di

peringkat ke-14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara potensi lahan yang luas dan hasil produksi yang masih perlu ditingkatkan. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan akses informasi, teknologi, hingga kemampuan pengelolaan usahatani yang masih konvensional (BPS, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa *padi* bukan sekadar tanaman pangan, melainkan fondasi ekonomi lokal yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK untuk turut mendorong peningkatan nilai tambahnya.

Dalam perspektif kebijakan nasional, *padi* menjadi fokus utama pemerintah dalam program swasembada pangan yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan produksi nasional sebesar 53,63 juta ton gabah kering giling pada tahun 2023, sebagai bagian dari upaya mengamankan pasokan domestik (BPS, 2023). Namun, tantangan yang dihadapi di tingkat daerah, termasuk Tulang Bawang, tidaklah sederhana. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan degradasi infrastruktur irigasi memperparah ketimpangan produksi (Pusluhtan, 2012). Di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja muda di sektor pertanian juga menurun drastis, sehingga proses budidaya seperti penanaman dan panen menghadapi kendala signifikan (Ahmad & Haryono, 2007). Masalah ketidaksinkronan jadwal tanam yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja mengakibatkan efisiensi produksi terganggu, bahkan menurunkan kualitas panen. Ini menjadi refleksi penting bahwa untuk menjadikan *padi* sebagai komoditas unggulan yang benar-benar produktif, diperlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya teknis tetapi juga berbasis sosial dan kelembagaan.

Kondisi agraria di Tulang Bawang menunjukkan bahwa potensi pengembangan *padi* sebagai komoditas utama sangat besar, namun belum dikelola secara maksimal. Data menunjukkan bahwa mayoritas lahan yang digunakan petani merupakan lahan milik sendiri, yang awalnya diberikan melalui program transmigrasi lokal (Translok) sejak 1986 (Dartana et al., 2024). Luas rata-rata kepemilikan petani berada pada kisaran 1 hektar dan pengolahan lahan umumnya menggunakan *hand tractor*, yang menunjukkan adanya modernisasi meski belum menyeluruh. Namun tantangan produktivitas tetap besar. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya penguasaan teknologi budidaya, yang erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan teknis yang memadai. Hal ini diperparah dengan tingginya biaya produksi, terutama pada komponen tenaga kerja dan *saprodi*, yang secara langsung menggerus pendapatan petani (Sari, 2023). Oleh sebab itu, optimalisasi sektor *padi* tidak hanya terletak pada peningkatan hasil, tetapi juga pada efisiensi usaha, akses terhadap teknologi, dan pelibatan aktor-aktor sosial seperti kelompok PKK untuk memperluas kontribusi ekonomi berbasis keluarga.

Pertanian memiliki peranan fundamental dalam struktur perekonomian lokal, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis dan sosial mengandalkan sektor primer sebagai basis pembangunan. Kabupaten Tulang Bawang, sebagai bagian dari Pulau Sumatra, menunjukkan keterkaitan erat antara sistem ekonomi daerah dan aktivitas pertanian, khususnya pada komoditas *padi*. Aktivitas pertanian tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi penggerak utama roda ekonomi rumah tangga petani. Di tingkat lokal, pertanian menyediakan peluang kerja bagi anggota keluarga dan masyarakat sekitar, mulai dari produksi hingga distribusi hasil pertanian. Kondisi ini sangat berkontribusi terhadap stabilitas pendapatan masyarakat, yang berdampak langsung terhadap konsumsi, daya beli, dan perputaran ekonomi desa. Sektor pertanian juga memiliki hubungan langsung dengan sektor lain, seperti jasa dan perdagangan, yang berkembang seiring dengan peningkatan hasil produksi tani (Rompas et al., 2015). Peningkatan pendapatan dari hasil pertanian turut berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya

aktivitas subsisten, melainkan penggerak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan (Oktavia et al., 2015).

Sebagai wilayah yang memiliki lahan subur dan masyarakat agraris, potensi pertanian Tulang Bawang sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Salah satu bentuk kontribusi utama sektor ini adalah dalam mendukung *ketahanan pangan* daerah. Ketahanan pangan tidak sekadar mencerminkan ketersediaan bahan pangan secara kuantitatif, tetapi juga menggambarkan aksesibilitas, keberagaman, dan kesinambungan pasokan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, *ketahanan pangan* menjadi kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan sampai pada tingkat individu, yang hanya dapat dicapai melalui sistem pertanian yang produktif dan efisien (Pemerintah Pusat Indonesia, 2012). Dalam konteks Tulang Bawang, penguatan pertanian lokal secara langsung memperkuat sistem distribusi dan konsumsi pangan yang merata, sehingga tidak bergantung pada pasokan eksternal. Terjaganya pasokan *padi* lokal yang cukup dan stabil membantu menurunkan kerentanan masyarakat terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan pangan. Di tengah berbagai tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim, pertanian daerah memiliki potensi sebagai *penyangga ekonomi sekaligus penjaga kedaulatan pangan* yang tangguh (Sutrisno, 2022).

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian lokal juga dapat diamati melalui indikator pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, bahkan ketika sektor-sektor lain mengalami kontraksi. Pada periode 2011 hingga 2020, sektor pertanian menjadi satu dari sedikit sektor yang menunjukkan tren positif di tengah tekanan global seperti krisis keuangan 2015 dan pandemi Covid-19 (Barika et al., 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa pertanian memiliki daya tahan tinggi dan mampu menjadi *penyangga ekonomi mikro* ketika sektor industri atau jasa mengalami stagnasi. Di Pulau Sumatra secara umum, dan Tulang Bawang khususnya, sektor ini terbukti menyediakan solusi ekonomi berkelanjutan, terutama pada situasi darurat. Pertumbuhan ekonomi yang dipicu sektor pertanian juga menunjukkan efek *multiplikatif* terhadap sektor lain, termasuk layanan penyuluhan, pelatihan, dan jasa transportasi hasil pertanian (Naibaho & Damanik, 2023). Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian akan menghasilkan efek langsung pada ketahanan pangan, pendapatan petani, dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Ketika pertanian diperkuat melalui kebijakan dan partisipasi masyarakat, termasuk peran aktif kelompok seperti PKK, maka ketahanan pangan dan ekonomi lokal tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang secara progresif.

Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan nilai tambah produk *padi* di Kabupaten Jember adalah dominasi pola *monokultur* yang masih diterapkan oleh sebagian besar petani. Sistem ini mengandalkan satu jenis tanaman dalam satu siklus tanam, yang menyebabkan risiko kegagalan panen menjadi tinggi ketika terjadi gangguan cuaca, serangan hama, atau penurunan kualitas benih. Ketergantungan pada satu komoditas ini juga menyebabkan terbatasnya variasi produk olahan yang bisa dikembangkan. Masalah ini menjadi lebih kompleks karena mayoritas petani belum menguasai teknik diversifikasi tanaman yang adaptif dan ramah lingkungan. Akademisi dari Universitas Jember telah melakukan beberapa inovasi seperti perbenihan unggul dan pestisida nabati, tetapi adopsi teknologi ini masih rendah di kalangan petani (Ikhlas et al., 2024). Di sisi lain, pemerintah daerah belum maksimal dalam mendukung penyuluhan dan pelatihan mengenai sistem tanam bergilir atau *multiple cropping*, padahal hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas dan membuka potensi pengolahan yang lebih luas (Muhammad, 2021). Minimnya pemahaman petani mengenai nilai ekonomi dari diversifikasi pertanian menyebabkan kegiatan budidaya tetap stagnan di tahap konvensional, yang menghambat optimalisasi potensi lahan dan pendapatan petani.

Fluktuasi harga gabah merupakan tantangan lain yang krusial dalam meningkatkan nilai ekonomi *padi*, terutama saat panen raya ketika harga jual sering jatuh drastis. Ketidakstabilan

harga ini berdampak langsung pada pendapatan petani yang sudah terbebani dengan biaya produksi tinggi, terutama sejak pengurangan subsidi pupuk dari pemerintah pusat (Ikhlas et al., 2024). Petani pun terpaksa menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang tidak menguntungkan karena kurangnya akses langsung ke pasar yang lebih kompetitif (Fauzi, 2018). Situasi ini terjadi karena belum terbentuknya sistem rantai pasok yang efisien dan terintegrasi antara produsen dan konsumen akhir. Pemerintah sebenarnya telah melakukan monitoring harga melalui instansi terkait, namun belum disertai dengan kebijakan protektif terhadap harga gabah di tingkat petani (DP.23.1 dalam Ikhlas et al., 2024). Di sisi lain, peran industri dalam membentuk jaringan pemasaran dan distribusi produk *padi* juga masih terbatas pada skala lokal. Akibatnya, petani tetap berada dalam posisi lemah secara ekonomi dan tidak memiliki daya tawar terhadap pasar. Ketika harga anjlok, petani merugi dan enggan berinvestasi dalam peningkatan mutu produksi, yang pada gilirannya memutus siklus nilai tambah komoditas.

Pengolahan *pascapanen* yang rendah juga menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan nilai tambah produk *padi* di Kabupaten Jember. Sebagian besar petani masih menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering tanpa dilakukan proses pengolahan lebih lanjut seperti penggilingan modern, pengemasan, atau diversifikasi produk turunan. Padahal, nilai ekonomi *padi* bisa berlipat ganda jika melalui tahap *value added* seperti pembuatan beras kemasan premium, tepung beras, atau produk olahan instan berbasis beras (Rohman, 2020). Sayangnya, keterbatasan akses terhadap teknologi pengolahan menjadi kendala utama. Meskipun telah tersedia beberapa mesin pengolahan dari sektor industri, penggunaan alat ini masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum merata ke seluruh wilayah produksi (Khusna et al., 2019). Di sisi lain, pelatihan yang diberikan oleh akademisi dan penyuluh pertanian belum menyentuh aspek hilirisasi secara menyeluruh. Industri pun belum sepenuhnya terlibat dalam membentuk skema produksi berbasis industri rumah tangga yang mampu memanfaatkan hasil panen secara maksimal. Ketika pengolahan terbatas, petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil mentah dengan margin keuntungan yang kecil. Hal ini menciptakan lingkaran tantangan yang hanya bisa diputus melalui integrasi peran pemerintah, akademisi, dan industri dengan pendekatan kolaboratif yang terstruktur.

Gerakan *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* (PKK) lahir dari semangat membangun bangsa melalui penguatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat. PKK tumbuh dari akar rumput, dimulai dari kebutuhan mendasar masyarakat untuk menghadirkan wadah pemberdayaan berbasis keluarga yang menjangkau berbagai lini kehidupan, terutama di tingkat desa. Dalam perkembangannya, PKK dibentuk sebagai *gerakan nasional* yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat itu sendiri, dengan tujuan utama menciptakan keluarga Indonesia yang beriman, sehat, mandiri, serta sadar hukum dan lingkungan (Wati, 2015). Gerakan ini terus berkembang dan kini memiliki struktur yang berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, yang seluruhnya terintegrasi dalam pelaksanaan program berbasis komunitas (Saleha et al., 2016). Di tengah dinamika sosial yang penuh tantangan, PKK hadir sebagai pelengkap kebijakan pemerintah dalam menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Keberadaan PKK pun tidak lepas dari proses adaptasi terhadap perubahan zaman, di mana lembaga ini tetap eksis dan relevan dalam mengusung nilai-nilai gotong royong, kepedulian, dan pemberdayaan secara berkelanjutan. Posisi strategis PKK sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik menjadikannya sebagai elemen penting dalam pembangunan sosial berbasis keluarga dan komunitas (Ramadani, 2020).

PKK memiliki *visi* besar untuk mewujudkan keluarga yang *beriman dan bertaqwa*, berakhlak mulia, sehat sejahtera lahir batin, mandiri, serta memiliki kesadaran gender dan lingkungan hidup. Untuk mendukung hal itu, PKK menjalankan lima *misi utama*, yakni pembentukan karakter keluarga, peningkatan pendidikan dan ekonomi keluarga, pemenuhan

kebutuhan dasar, pengelolaan lingkungan sehat, serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PKK itu sendiri (Sutedjo, 2006). Misi-misi ini secara operasional diterjemahkan ke dalam *10 Program Pokok PKK*, yang mencakup berbagai aspek mulai dari penghayatan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, hingga kelestarian lingkungan hidup. Visi-misi ini bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi telah membumi dalam berbagai bentuk kegiatan riil yang menyentuh masyarakat paling bawah. Dalam konteks pedesaan seperti di Desa Genteng, misalnya, program-program PKK berperan nyata dalam menjawab permasalahan masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan keluarga, hingga kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan keterampilan rumah tangga dan penguatan ekonomi keluarga (Rantung et al., 2018). Program seperti posyandu, pelatihan memasak, pengajian rutin, serta pelatihan koperasi rumah tangga menjadi manifestasi langsung dari implementasi misi PKK yang relevan dengan kebutuhan komunitas.

Selain membawa misi besar secara nasional, PKK juga menempatkan keluarga sebagai *sasaran utama* dalam seluruh proses pemberdayaan. Sasaran ini mencakup dua aspek utama, yakni penguatan mental spiritual dan pemenuhan kebutuhan fisik-material. Dalam aspek mental spiritual, PKK menekankan pentingnya perilaku hidup berbasis nilai Pancasila dan keimanan kepada Tuhan, yang diwujudkan melalui pengamalan nilai moral, gotong royong, serta penguatan identitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Kadma, 2017). Sementara dari sisi fisik-material, PKK menyasar pemenuhan kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan ini diperkuat melalui kegiatan peningkatan keterampilan, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan edukasi lingkungan sehat. Upaya yang dilakukan oleh PKK, baik dalam lingkup kebijakan maupun praktik komunitas, menunjukkan bahwa lembaga ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan masyarakat berbasis keluarga. Peran PKK yang adaptif dan kolaboratif, termasuk dalam upaya resolusi konflik seperti yang terjadi di Desa Genteng, membuktikan bahwa nilai-nilai yang diusung lembaga ini sangat strategis dalam menciptakan harmoni sosial, kesejahteraan kolektif, dan ketahanan keluarga secara berkelanjutan (Aufar et al., 2022).

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh kelompok PKK di Desa Wajok Hilir telah menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam memperluas pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap diversifikasi hasil tani. Dalam pelatihan ini, ibu-ibu PKK tidak hanya menerima penyuluhan mengenai manfaat pengolahan kelapa dan pisang, tetapi juga terlibat aktif dalam praktik pembuatan berbagai produk turunan seperti *kelapa parut kering*, *coco cake*, *selai*, *nata de coco*, *sirup*, serta *tepung pisang*, *cookies*, dan *keripik pisang* (Fachruddin, 2008; Sukamto, 2001). Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dalam kelompok kecil, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang cukup untuk belajar langsung menggunakan alat dan teknik pengolahan yang diperkenalkan oleh tim pelaksana program. Pendekatan partisipatif semacam ini sangat efektif terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, karena metode *learning by doing* terbukti meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan baru (Munadjim, 1983). Selain pelatihan teknis, modul yang diberikan juga mencakup aspek kewirausahaan dan pencatatan keuangan sederhana, yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil berbasis rumah tangga. Melalui kegiatan pelatihan ini, PKK secara nyata berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang terampil dalam memanfaatkan hasil pertanian untuk peningkatan ekonomi keluarga. Kehadiran PKK dalam kapasitas ini menjadi katalisator pembelajaran berbasis komunitas yang berdampak pada transformasi sosial dan ekonomi masyarakat petani.

Pengolahan hasil tani menjadi produk olahan siap jual merupakan langkah strategis yang dilakukan PKK untuk meningkatkan *nilai tambah* komoditas lokal seperti kelapa dan pisang. Di Desa Wajok Hilir, kegiatan pengolahan ini tidak berhenti pada pemanfaatan buah utuh, tetapi juga mencakup pengolahan limbah seperti air kelapa, kulit, bonggol, dan jantung pisang yang

sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal (Yuliani, 2011; Rukmana, 1999). Misalnya, air kelapa diolah menjadi *nata de coco* dan sirup, sementara jantung pisang diolah menjadi nugget dan keripik. Produk-produk ini tidak hanya memiliki nilai jual tinggi tetapi juga memiliki potensi pasar yang luas karena menawarkan alternatif makanan bergizi dan inovatif. Partisipasi aktif anggota PKK dalam proses pengolahan menunjukkan tingginya minat dan kesadaran terhadap potensi ekonomi yang dimiliki oleh hasil tani lokal. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat, terutama perempuan, untuk lebih mandiri secara ekonomi dan berani membuka usaha rumahan berbasis produk olahan. Proses pelatihan hingga produksi dilakukan dengan memanfaatkan alat-alat sederhana seperti blender, mixer, oven, dan cetakan kue yang mudah diperoleh dan dioperasikan. Keberhasilan kegiatan ini tercermin dalam hasil evaluasi, di mana mayoritas peserta dinilai sudah mampu menjalankan proses produksi sesuai standar dan memahami cara menjaga kualitas produk olahan yang mereka buat (Palungkun, 1993). PKK melalui aktivitas ini mampu memperkuat kemandirian pangan lokal dan membangun ekosistem usaha mikro berbasis pertanian di tingkat desa.

Pemasaran produk olahan menjadi aspek lanjutan yang juga ditangani oleh PKK melalui pelatihan teknik pemasaran dan pengemasan. Dalam pelaksanaannya, peserta dibekali strategi pemasaran dasar yang meliputi pembuatan label, penyusunan brosur produk, serta pengenalan media sosial sebagai saluran promosi digital (Susanto & Sucipto, 1994). Meskipun sebagian besar peserta belum familiar dengan sistem pemasaran daring, adanya pendampingan dari tim pengabdian masyarakat menjadikan proses adaptasi lebih mudah. Teknik pengemasan juga mendapat perhatian penting karena berkaitan langsung dengan daya tarik konsumen. Produk yang dikemas menarik dengan bahan yang sesuai standar kebersihan dan estetika cenderung memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih mudah diterima pasar. Dalam hal ini, PKK berperan sebagai motor penggerak edukasi pasar yang menyentuh aspek produksi dan distribusi secara holistik. Dampak dari pelatihan ini terlihat pada meningkatnya minat peserta untuk memasarkan produknya, baik melalui kerja sama dengan koperasi desa, pasar mingguan, maupun secara langsung ke konsumen. Selain memperluas jangkauan pasar, kegiatan ini juga membangun semangat kewirausahaan di kalangan ibu rumah tangga yang selama ini belum produktif secara ekonomi. Dengan strategi pemasaran yang sederhana namun tepat sasaran, produk olahan pertanian yang dihasilkan mampu bersaing di pasar lokal dan membuka peluang penghasilan tambahan bagi keluarga petani di desa tersebut.

Ibu-ibu PKK di desa-desa pertanian seperti Alue le Puteh memiliki kapasitas luar biasa dalam mengelola hasil padi menjadi *produk olahan* bernilai ekonomis tinggi jika diarahkan dan difasilitasi dengan pelatihan serta pendampingan yang tepat. Seperti yang telah ditunjukkan melalui kegiatan pelatihan kerajinan tas dari pelepah pisang dan pinang, antusiasme ibu-ibu PKK dalam menyerap keterampilan baru sangat tinggi, bahkan menunjukkan kemampuan mengolah bahan alami yang sebelumnya tidak dianggap bernilai menjadi produk komersial (Handayani, 2018). Padi sebagai komoditas utama masyarakat petani sebenarnya tidak hanya terbatas pada beras, tetapi limbahnya seperti jerami, sekam, dan dedak dapat diolah menjadi *kerajinan, makanan ringan*, atau bahan campuran industri kecil. Potensi besar ini akan terus tumbuh jika ada keterpaduan antara pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan dukungan pemasaran dari berbagai pihak. Berdasarkan pendekatan pemberdayaan, ibu-ibu PKK bukan hanya pelaku pelengkap dalam ekonomi rumah tangga, namun mampu menjadi aktor utama perubahan ekonomi lokal jika mendapatkan akses terhadap pelatihan dan sumber daya (Mardikanto, 2010). Dalam konteks ini, keterampilan mengelola hasil panen dan limbah padi bisa dijadikan sebagai penggerak ekonomi rumah tangga yang tahan terhadap fluktuasi hasil panen dan harga pasar. Ketika kegiatan ekonomi berbasis *hasil pertanian* mulai digerakkan dari lingkup rumah tangga, ibu-ibu PKK secara kolektif akan menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi desa berbasis inovasi lokal.

Program pengembangan keterampilan yang melibatkan ibu-ibu PKK dapat membuka pintu besar dalam pengolahan hasil padi menjadi produk kreatif seperti *kerupuk beras*, *rengginang*, *tepung beras*, *emping beras*, hingga aneka produk makanan instan. Berbagai pelatihan pengolahan hasil pertanian seperti yang diterapkan pada kelapa dan pisang di Wajok Hilir terbukti berhasil meningkatkan keterampilan dan semangat kewirausahaan kelompok perempuan, termasuk pemahaman tentang pembukuan, teknik pengemasan, dan strategi pemasaran (Susanto & Sucipto, 1994). Jika pendekatan serupa diterapkan pada pengolahan hasil padi, potensi ekonominya akan sangat besar, apalagi mengingat produk olahan dari padi memiliki permintaan tinggi di pasar lokal dan regional. Ibu-ibu PKK dapat membentuk unit usaha kecil berbasis rumah tangga yang memanfaatkan bahan baku padi dari lahan pertanian keluarga atau desa mereka sendiri, menciptakan rantai nilai yang terintegrasi dari sawah ke pasar. Produk olahan ini bahkan bisa diarahkan untuk masuk pasar oleh-oleh atau pasar digital, menyesuaikan tren konsumsi masyarakat modern yang mengapresiasi produk *berbasis lokal* yang sehat dan memiliki cerita asal usul yang kuat. Dalam hal ini, ibu-ibu PKK bisa menjadi pionir dari sistem pertanian berkelanjutan yang tidak hanya mengandalkan hasil panen primer, tetapi juga mengoptimalkan nilai dari setiap bagian tanaman padi. Selain menambah nilai ekonomi, kegiatan ini juga menciptakan ruang aktualisasi diri dan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga.

Pelatihan keterampilan mengelola hasil padi yang disertai pendampingan langsung akan mempercepat proses adaptasi dan inovasi ibu-ibu PKK terhadap peluang usaha. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan PKM di Desa Alue le Puteh, pendekatan *tatap muka*, *demonstrasi langsung*, dan *tanya jawab interaktif* mampu membangun kedekatan emosional peserta dengan instruktur, sekaligus menumbuhkan semangat kolaborasi antarkelompok PKK (Wulandari & Achir, 2015). Proses pelatihan tersebut tidak hanya memberi ilmu teknis, tetapi juga membentuk komunitas belajar yang aktif berbagi praktik baik antaranggota. Hal ini sangat mendukung lahirnya ekosistem usaha kecil yang solid di tingkat desa. Produk olahan padi seperti makanan ringan dan kerajinan dari jerami atau sekam bisa menjadi cikal bakal industri rumah tangga yang memiliki nilai jual tinggi jika dibarengi dengan packaging menarik, branding lokal, serta strategi pemasaran digital. Komunitas ibu-ibu PKK juga memiliki kekuatan sosial yang kuat karena relasinya yang erat dengan struktur masyarakat, yang memudahkan proses sosialisasi produk maupun distribusinya. Sinergi antara pengetahuan lokal, semangat kolektif, dan keterampilan yang terasah akan menjadikan ibu-ibu PKK sebagai kekuatan strategis dalam mendongkrak ekonomi desa berbasis hasil pertanian. Mereka tidak hanya akan menopang keluarga dari sisi ekonomi, tetapi juga menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini berfokus pada pertanyaan mengenai bagaimana *optimalisasi peran PKK* dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas padi, khususnya di wilayah Tulang Bawang. Untuk menjawab hal tersebut, tujuan utama dari artikel ini adalah mengeksplorasi potensi yang dimiliki kelompok PKK, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian, serta merumuskan strategi sinergi yang efektif antara ibu-ibu PKK dan para petani padi. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat posisi ekonomi keluarga petani melalui pengolahan dan pemanfaatan hasil panen padi menjadi produk yang bernilai jual tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* berbasis *studi literatur* yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran strategis PKK dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas padi, khususnya di daerah Tulang Bawang. Data dikumpulkan melalui *telaah pustaka* yang mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah daerah, dokumen kelembagaan PKK, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pertanian padi, pemberdayaan perempuan, dan peran organisasi sosial masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah *analisis tematik*, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola tematik utama terkait kontribusi PKK dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Studi kasus difokuskan pada wilayah Tulang Bawang, di mana data literatur dikaitkan secara kontekstual dengan statistik lokal dan kebijakan daerah, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peluang dan tantangan yang dihadapi dalam membangun sinergi antara PKK dan petani padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Ekonomi Komoditas Padi di Tulang Bawang

Gambar 1. Produksi Padi Tahunan di Tulang Bawang

Sumber: olah data penulis dari data BPS

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu sentra pertanian padi di Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor agribisnis, khususnya komoditas padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan pertanian sawah di Kecamatan Rawajitu Selatan, salah satu wilayah transmigrasi yang berkembang menjadi pusat produksi padi, mencapai 8.662 hektar (BPS, 2021). Sejak awal pengembangan lahan pada tahun 1986, daerah ini difokuskan sebagai kawasan pertanian lahan rawa pasang surut yang dialihfungsikan menjadi sawah produktif. Para petani di wilayah ini rata-rata mengelola lahan seluas 1 hektar, meskipun terdapat variasi dari 0,5 hingga lebih dari 1 hektar tergantung kepemilikan. Sebagian besar petani adalah pemilik lahan sendiri hasil dari program transmigrasi lokal. Klasifikasi usahatani menunjukkan bahwa sebanyak 72,4% petani memiliki lahan 1 hektar, sementara sisanya tersebar dalam kelompok luas yang lebih kecil maupun lebih besar (Dartana et al., 2024). Seluruh pengolahan lahan didominasi oleh penggunaan *hand traktor*, menandakan peningkatan adopsi teknologi dasar pertanian di tingkat petani.

Dari sisi produksi tahunan, data BPS menunjukkan peningkatan signifikan dalam total produksi padi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, total produksi padi di Tulang Bawang mencapai 215.987,34 ton. Jumlah ini meningkat menjadi 267.193,74 ton pada 2022, dan kembali melonjak menjadi 319.193,88 ton pada 2023 (BPS, 2024). Peningkatan ini mencerminkan hasil dari intensifikasi budidaya padi, termasuk peningkatan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 300, bahkan IP 400 di beberapa wilayah seperti Desa Wono Agung. Produktivitas lahan yang semula hanya 2,5 hingga 3 ton per hektar, kini telah meningkat menjadi rata-rata 6,5 hingga 7 ton per hektar. Pola ini memperlihatkan efisiensi input produksi, penggunaan teknologi pertanian seperti *transplanter*, serta optimalisasi waktu tanam yang lebih sinkron, berdampak besar pada kuantitas produksi. Efisiensi ini juga ditunjukkan dari penghematan biaya produksi hingga Rp 280.000 per hektar menggunakan metode *transplanter* dibanding metode tanam manual (Dartana et al., 2024).

Kontribusi sektor pertanian padi terhadap pendapatan petani di Tulang Bawang sangat signifikan, terutama dalam kondisi lahan milik pribadi yang memungkinkan petani memaksimalkan hasil usaha taninya. Dalam satu musim tanam, petani rata-rata memperoleh pendapatan sebesar Rp 21.612.593 per hektar, setelah dikurangi biaya produksi yang rata-rata sebesar Rp 9.747.407 (Dartana et al., 2024). Tingginya rasio R/C sebesar 1,451 memperlihatkan bahwa usahatani padi di daerah ini tergolong layak dan menguntungkan, yang berarti setiap Rp 1.000 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1.451. Pendapatan tersebut menjadi tumpuan ekonomi rumah tangga petani, terutama karena sebagian besar keluarga bergantung penuh pada hasil pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Dari hasil analisis regresi yang dilakukan, biaya sewa lahan, biaya tenaga kerja, dan biaya pestisida terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan petani. Meskipun demikian, struktur pengeluaran terbesar masih berada pada tenaga kerja (54,27%) dan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida. Dengan demikian, efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi di Tulang Bawang.

Petani di Tulang Bawang menghadapi kendala serius dalam *meningkatkan nilai tambah* padi, karena hampir seluruh hasil panen langsung dijual sebagai *gabah mentah* tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Saat panen raya, petani berharap dapat menjual gabah ke Bulog dengan harga sekitar Rp 6.500 per kilogram, tetapi penyerapan Bulog dibatasi hanya 10 ton per hari sehingga banyak gabah melimpah terpaksa ditawarkan ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah, yakni sekitar Rp 5.300 per kilogram. Skema ini menggeser margin keuntungan ke pihak tengkulak dan pabrik besar, sementara petani menerima imbal hasil yang minimal. Ketiadaan fasilitas pengeringan dan penyimpanan di tingkat desa memperburuk kondisi, karena petani harus segera melepas gabah agar tidak mengalami penurunan kualitas. Keterbatasan akses modal dan teknologi juga menghambat pendirian unit-unit *penggilingan lokal* atau *pabrik beras* skala kecil yang bisa memangkas rantai pasok dan menyerap lebih banyak padi kering giling. Kurangnya pelatihan bagi kelompok tani dan dukungan kelembagaan menahan ikhtiar masyarakat untuk melakukan usaha tambah nilai seperti *parboiling*, *beras organik*, atau *beras instan*. Tanpa intervensi strategis, tren ini akan terus mengekang kesejahteraan petani sekaligus mengurangi potensi pendapatan desa secara keseluruhan.

Mekanisme perdagangan yang masih *mengandalkan* gabah mentah juga membuat petani kehilangan kesempatan menambah pendapatan melalui diversifikasi produk. Luas panen padi di Tulang Bawang mencapai 52.601,29 hektar dengan total produksi 215.987,34 ton pada 2021, namun produktivitasnya yang hanya 44,20 kuintal per hektar menempati peringkat ke-14 dari 15 kabupaten/kota di Lampung. Rendahnya produktivitas mendorong petani fokus menanam luas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa memikirkan proses lanjutan yang bisa menaikkan harga jual. Ketergantungan pada tengkulak menyulitkan petani menawar harga lebih baik, sementara fluktuasi pasar gabah semakin melemahkan stabilitas pendapatan. Minimnya modal untuk

investasi mesin pengering atau *rice mill* lokal membuat proses *post-harvest* tetap tradisional, padahal nilai jual olahan seperti *beras premium*, *beras ketan*, atau *gulip* jauh lebih tinggi. Para petani juga belum terbiasa dengan konsep *brand* dan *kemasan* yang menarik untuk penjualan di pasar regional atau daring, sehingga potensi ceruk pasar modern tetap tertutup.

Keterbatasan diversifikasi produk padi mengokohkan dominasi penjualan gabah mentah sebagai solusi cepat per bulan panen. Se jauh ini, hampir tidak ada usaha kelompok tani atau lembaga desa yang memproduksi *beras instan*, *beras organik*, pun *olahan sekunder* seperti *kripik kulit gabah* atau *minuman fermentasi* berbasis sekam, yang sebenarnya dapat meningkatkan margin hingga dua kali lipat dibandingkan gabah biasa. Sosialisasi dan pelatihan kerap baru sebatas teknik budidaya, tanpa menekankan pentingnya *pengolahan pascapanen* dan *pengemasan kreatif*. Kurangnya kolaborasi dengan sektor swasta atau lembaga keuangan mikro juga membatasi akses peralatan dan jalur distribusi. Akibatnya, ragam produk padi di pasar lokal masih monoton, sedangkan konsumen modern mencari nilai tambah berupa kualitas, *kemasan higienis*, dan jaminan *sertifikasi organik*. Transformasi ini memerlukan pendampingan intensif serta insentif kebijakan yang mempermudah kelompok tani mendirikan unit pengolahan dan memasarkan produk jadi di pasar lebih luas.

Peran Strategis PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Peran *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* (PKK) dalam masyarakat petani bukan hanya sebagai organisasi formal pelengkap kegiatan desa, tetapi telah berkembang sebagai aktor kunci dalam upaya membina keluarga secara menyeluruh. PKK memiliki fungsi ganda, yakni sebagai penyuluh yang membentuk kesadaran kolektif dan fasilitator yang mendorong keluarga agar mampu memanfaatkan potensi lokal secara produktif. Dalam keluarga petani di Tulang Bawang, beban ekonomi tidak hanya ditopang oleh suami sebagai petani utama, tetapi juga oleh istri yang terlibat dalam berbagai aktivitas mulai dari membantu di sawah hingga memproses hasil panen menjadi produk olahan. Keterlibatan perempuan dalam rantai nilai komoditas padi masih kurang dioptimalkan karena keterbatasan akses pada pelatihan, teknologi, dan informasi pasar. Melalui PKK, perempuan mulai dikenalkan pada pelatihan pengolahan pangan, pemasaran digital, dan keterampilan manajerial dasar rumah tangga tani (*household farm management*). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pendekatan pembangunan berbasis keluarga sebagai unit terkecil dalam sistem sosial ekonomi (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2005). Di tengah tantangan ketidaksetaraan akses dan ketergantungan ekonomi pada suami, kehadiran PKK membuka jalan bagi perempuan untuk meningkatkan *bargaining power*-nya secara sosial maupun ekonomi (Tim Penggerak PKK Pusat, 2015).

PKK berfungsi tidak hanya sebagai *penggerak masyarakat*, tetapi juga sebagai *pembina kapasitas individu*, khususnya perempuan petani. Banyak perempuan desa yang awalnya hanya menjalankan peran domestik kini mulai bertransformasi menjadi pelaku ekonomi berkat adanya pelatihan-pelatihan praktis yang diinisiasi oleh kader PKK. Program seperti pelatihan tata boga, keterampilan menjahit, pengelolaan hasil pertanian, hingga literasi digital menjadi titik masuk pemberdayaan berbasis kebutuhan riil keluarga tani. Kondisi ini semakin relevan jika dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar perempuan petani di Tulang Bawang memiliki tingkat pendidikan formal terbatas dan keterbatasan waktu karena tanggung jawab ganda dalam rumah tangga. Pemberdayaan yang dilakukan PKK dilakukan secara *bottom-up*, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, menjadikan proses transformasi ini tidak sekadar program intervensi, melainkan bagian dari budaya partisipasi (Suharto, 2014). Dalam struktur sosial petani, penguatan peran perempuan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan *ketahanan ekonomi* rumah tangga. Ketika perempuan memiliki keterampilan dan pendapatan tambahan, keluarga menjadi lebih adaptif terhadap risiko usaha tani seperti fluktuasi harga gabah atau

keterbatasan penyerapan hasil panen oleh lembaga negara. Di sinilah letak kekuatan PKK sebagai jembatan antara kebutuhan mikro rumah tangga dan visi makro pembangunan desa.

Fungsi lain dari PKK yang tidak kalah krusial adalah sebagai wadah sosial yang memberi ruang bagi perempuan untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan memperkuat jejaring sosial. Di berbagai desa pertanian, termasuk di Kecamatan Rawajitu Selatan, PKK menjadi media komunitas perempuan untuk mengasah *kepercayaan diri* dalam mengambil peran strategis baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Saat perempuan mulai aktif mengikuti pertemuan PKK, menghadiri pelatihan, hingga menjadi narasumber lokal, mereka mengalami peningkatan dalam penguasaan keterampilan teknis dan *leadership capacity*. Namun realitas di lapangan masih menunjukkan beberapa tantangan seperti minimnya kompetensi digital kader PKK, kurangnya sosialisasi program secara merata, dan keterbatasan anggaran operasional untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan (Jurnal Moderat, 2019). Untuk menjawab hambatan ini, PKK di berbagai daerah mulai merintis model pembiayaan swadaya, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber daya pelatihan. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, keberhasilan pemberdayaan perempuan oleh PKK akan berdampak langsung terhadap penguatan daya tahan sosial dan ekonomi keluarga petani di Tulang Bawang. Hal ini sekaligus menjadi landasan bahwa PKK bukan sekadar organisasi, melainkan agen transformasi yang mampu mendorong keluarga petani menuju kemandirian berkelanjutan.

Peningkatan *nilai tambah* komoditas padi di Tulang Bawang dapat dimulai dari pelatihan intensif mengenai pengolahan *beras organik* yang memiliki pasar tersendiri dengan nilai jual yang relatif lebih tinggi. Pelatihan ini bukan hanya memfokuskan pada teknik budidaya bebas pestisida dan bahan kimia sintetis, tetapi juga pada edukasi mengenai manfaat kesehatan dan keamanan pangan berbasis konsumsi *pangan fungsional*. Pengolahan *beras organik* dapat diarahkan menjadi *beras pecah kulit* (BPK) yang lebih kaya kandungan gizi, seperti serat pangan, protein, lemak esensial, dan senyawa fenolik aktif (Moustapha et al., 2015). Meski demikian, tantangan utamanya adalah rendahnya preferensi konsumen akibat warna dan tekstur yang tidak sepopuler beras putih, serta kerentanan terhadap ketengikan selama penyimpanan (Saleh et al., 2019). Untuk mengatasi ini, pelatihan perlu mencakup proses pengolahan lanjutan seperti fermentasi, pengeringan, dan pengemasan vakum agar daya simpan dan daya tariknya meningkat. Selain itu, masyarakat harus diperkenalkan pada sistem labelisasi pangan organik yang dapat meningkatkan kredibilitas produk di pasar (Upadhyay, 2018). Dengan pendekatan pelatihan semacam ini, *kelompok wanita tani* dapat lebih siap dalam mengolah hasil panen menjadi produk organik bernilai ekonomi dan kesehatan tinggi.

Selain pengolahan *beras organik*, kegiatan yang strategis dalam menambah nilai produk padi adalah pelatihan pembuatan *produk turunan* seperti kerupuk beras, tepung beras, dan berbagai makanan ringan berbasis pati. Pelatihan pembuatan kerupuk dari *beras pecah kulit* adalah contoh nyata bagaimana inovasi produk dapat menjadi solusi ganda bagi isu kesehatan dan pendapatan rumah tangga petani (Sunarti & Michael, 2013). Dalam praktiknya, pelatihan ini mencakup tahap-tahap seperti pengolahan tepung *pregelatinisasi*, formulasi adonan, pengukusan, pengeringan, hingga teknik penggorengan yang menghasilkan kerupuk dengan daya kembang dan kerenyahan maksimal (Hendrikayanti et al., 2022). Berbagai variabel seperti suhu pengukusan, kadar air, dan jenis pati berpengaruh besar terhadap hasil akhir produk. Penambahan tepung beramilopektin tinggi seperti tapioka terbukti mampu memperbaiki tekstur dan cita rasa kerupuk (Suarti et al., 2022). Proses ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga aplikatif karena hasilnya dapat langsung diuji melalui evaluasi sensori menggunakan skala hedonik konsumen. Di tengah permintaan pasar lokal yang tinggi terhadap *snack berbahan dasar beras*, keterampilan membuat kerupuk beras membuka peluang usaha yang konkret dan ramah modal awal. Setiap tahapan pelatihan juga dirancang agar mudah diadopsi oleh ibu-ibu rumah tangga dengan alat-alat sederhana yang tersedia di lingkungan desa.

Selain pelatihan teknis pengolahan pangan, kegiatan yang memperkuat *kewirausahaan berbasis rumah tangga* juga harus diberikan ruang utama dalam kerangka optimalisasi peran PKK. Banyak kelompok wanita di desa masih terbatas dalam pemahaman mengenai perencanaan usaha, pembukuan sederhana, strategi pemasaran digital, dan akses pembiayaan mikro. Padahal, produk-produk seperti kerupuk beras, tepung beras organik, atau *cemilan sehat dari hasil padi* memiliki potensi pasar di toko oleh-oleh, swalayan lokal, dan bahkan platform *e-commerce*. Pelatihan kewirausahaan ini sebaiknya mencakup studi pasar, perizinan PIRT, sertifikasi halal, dan simulasi perhitungan HPP (harga pokok produksi) agar pelaku usaha memahami nilai jual dan keuntungan yang realistis (Wardhani & Anggraeni, 2018). Program seperti ini dapat difasilitasi oleh kader PKK sebagai *pendamping kewirausahaan* yang menghubungkan petani perempuan dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini, PKK tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi juga sebagai inkubator mikro dalam mendorong lahirnya *wirausaha perempuan berbasis pertanian*. Ketika pelatihan kewirausahaan dikombinasikan dengan kemampuan teknis pengolahan pangan, maka akan tercipta rantai nilai baru yang tidak lagi bergantung pada penjualan gabah mentah, melainkan berorientasi pada produk akhir siap jual.

Studi Strategi Optimalisasi Peran PKK

Dalam konteks pembangunan pedesaan berbasis pertanian, strategi optimalisasi peran *PKK* perlu dirancang secara sistematis agar mampu menyasar persoalan pokok yang dihadapi keluarga petani, khususnya perempuan. *PKK* bukan hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, melainkan sebagai jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat desa, termasuk dalam penguatan kelompok tani. Pendekatan kolaboratif antara *PKK*, kelompok tani, dan penyuluh pertanian menjadi kerangka awal yang dapat dikembangkan untuk memperluas cakupan dan efektivitas program pemberdayaan perempuan petani. Salah satu strategi awal yang dapat diterapkan adalah penguatan kapasitas *PKK* sebagai *penyuluh informal* melalui pelatihan intensif berbasis lokalitas, misalnya tentang sistem tanam sehat dan pengelolaan hasil pertanian berbasis rumah tangga (Djoh et al., 2022). Keberadaan perempuan dalam kelompok tani sebenarnya memiliki peran signifikan sebagai pengelola input produksi dan distribusi hasil panen, yang jika didukung dengan pelatihan intensif dari *PKK* akan berdampak pada peningkatan produktivitas padi di tingkat keluarga. Dalam praktiknya, kader *PKK* dapat diberdayakan menjadi *mentor agrikultural* yang mendampingi proses tanam hingga pascapanen, memperkuat aspek ketahanan pangan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui sinergi antara *PKK* dan penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan daerah agar proses transformasi berjalan secara terarah dan berkelanjutan (Bahrun et al., 2017).

Langkah lanjutan dalam optimalisasi peran *PKK* adalah menyusun *roadmap kegiatan kewirausahaan berbasis hasil pertanian* dengan menjadikan kelompok wanita tani sebagai mitra utama. Strategi ini mencakup pembentukan unit-unit kecil produksi olahan padi, seperti tepung beras, kerupuk, atau produk fermentasi yang bisa dikembangkan menggunakan pendekatan teknologi sederhana. Dalam hal ini, *PKK* bisa mengambil peran sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan pelatihan, pendampingan legalitas usaha, hingga promosi produk lokal melalui media sosial. Pendampingan yang terstruktur akan mendorong kelompok perempuan desa untuk tidak hanya menjadi pelaksana teknis produksi, tetapi juga memiliki kapabilitas manajerial usaha mikro yang mandiri (Mawarni et al., 2017). Strategi ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap hasil panen musiman dan memperluas nilai tambah produk pertanian, meningkatkan pendapatan keluarga petani di luar masa panen. Selain itu, program pelatihan kewirausahaan yang difasilitasi *PKK* juga berfungsi sebagai mekanisme adaptif untuk menghadapi dinamika pasar, termasuk fluktuasi harga gabah atau kelangkaan pupuk. Jika disertai sistem monitoring yang terintegrasi antaranggota, maka kolaborasi ini akan melahirkan

lingkaran usaha berbasis komunitas. Potensi ini dapat ditingkatkan dengan melibatkan lembaga pendidikan atau universitas sebagai pendukung riset dan inovasi usaha pertanian.

Optimalisasi peran *PKK* juga dapat diperkuat melalui strategi komunikasi yang diarahkan pada edukasi dan pengorganisasian massa perempuan secara efektif. Komunikasi partisipatif yang dibangun melalui forum diskusi kelompok, *focus group discussion*, dan *peer learning* akan mendorong keterlibatan aktif anggota *PKK* dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat kelompok tani. Peningkatan peran ini sangat berguna untuk membangun solidaritas kolektif dalam menghadapi tantangan teknis seperti pengelolaan hama, pengolahan pascapanen, dan pembagian hasil usaha tani. Dalam hal ini, *PKK* harus menjadi pelopor dalam membangun *jejaring kerja lintas sektor* dengan pihak desa, koperasi, dan sektor swasta. Strategi ini selaras dengan pendekatan *Interpretive Structural Modeling (ISM)* yang menyarankan penguatan pada titik penggerak seperti *penyuluhan, ketersediaan sarana produksi, dan penggunaan benih bermutu* sebagai kunci sukses pertanian berkelanjutan (Wahyuningsih, 2018). Dengan penempatan kader yang tepat, seperti ibu rumah tangga yang memiliki pengalaman atau pelatihan dalam bidang pertanian dan wirausaha, *PKK* dapat menyusun kegiatan berbasis *local wisdom* yang tidak memerlukan modal besar namun mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Untuk menjangkau efektivitas yang lebih luas, program ini dapat dimonitor dengan evaluasi berbasis data lapangan yang dikumpulkan setiap musim tanam atau panen.

Langkah strategis selanjutnya adalah mendorong integrasi antara perencanaan program *PKK* dengan kebijakan desa melalui *Musrenbangdes*, sehingga kebutuhan kelompok perempuan petani masuk dalam agenda pembangunan. Ini penting agar setiap program yang dicanangkan tidak berjalan sporadis dan memiliki pendanaan serta legitimasi formal. Salah satu strategi konkret adalah menetapkan *PKK* sebagai koordinator teknis dalam program diversifikasi pangan lokal, yang juga melibatkan anak muda desa dalam kegiatan inovatif berbasis teknologi pertanian. Pada titik ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk pelatihan teknologi budidaya dan pengolahan hasil pertanian yang bisa digunakan oleh anggota *PKK* dalam usaha rumahan. Kolaborasi ini juga akan memudahkan sinergi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi untuk menjembatani kebutuhan legalitas dan akses permodalan. Ketika *PKK* berperan sebagai simpul strategis antara institusi formal dan masyarakat, maka distribusi informasi, alat produksi, dan pelatihan menjadi lebih terstruktur (Pakraini, 2019). Kondisi ini juga akan mempercepat pencapaian indikator pembangunan desa seperti kemandirian pangan, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi keluarga petani. Oleh karena itu, studi strategi optimalisasi peran *PKK* harus dibarengi dengan komitmen semua pihak untuk menjadikan perempuan desa sebagai *pelaku utama pembangunan berbasis padi*.

KESIMPULAN

Optimalisasi peran *PKK* dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas padi di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan potensi besar dalam menjawab berbagai tantangan struktural dan teknis yang dihadapi sektor pertanian lokal. *PKK*, sebagai organisasi berbasis keluarga, telah terbukti menjadi aktor penting dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya perempuan petani, melalui pendekatan partisipatif dan pelatihan berbasis kebutuhan nyata. Dalam konteks pertanian padi, *PKK* mampu mengambil peran sebagai jembatan antara teknologi pertanian, pengetahuan pengolahan pascapanen, dan kewirausahaan rumah tangga. Dengan mengarahkan pelatihan kepada produk bernilai tambah seperti *kerupuk beras, beras organik*, serta olahan sekunder lainnya, *PKK* bukan hanya mendukung peningkatan pendapatan keluarga petani, tetapi juga membentuk struktur ekonomi lokal yang lebih resilien dan terdiversifikasi.

Strategi penguatan peran PKK dalam pembangunan ekonomi pedesaan juga mencakup kolaborasi lintas sektor yang melibatkan lembaga pemerintah, universitas, koperasi, dan sektor swasta. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan akses modal, teknologi, dan informasi pasar yang masih menjadi hambatan utama bagi rumah tangga petani. Selain itu, pelibatan PKK dalam perencanaan pembangunan desa seperti *Musrenbangdes* memberikan ruang legitimasi formal dan dukungan pendanaan terhadap program-program berbasis komunitas. Ketika program PKK dirancang untuk sinkron dengan kebutuhan lokal, serta disertai mekanisme pelatihan yang aplikatif dan terukur, maka hasilnya akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi keluarga, efisiensi usahatani, serta penciptaan lapangan kerja baru berbasis inovasi pertanian. Keberhasilan ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi turut memperkuat struktur sosial dan ekonomi desa secara keseluruhan.

PKK dapat menjadi penggerak utama transformasi ekonomi pertanian di Tulang Bawang, khususnya pada komoditas padi yang selama ini hanya dieksploitasi pada tahap produksi primer. Melalui pelatihan pengolahan hasil tani, kewirausahaan, serta penguatan literasi digital dan manajerial, perempuan desa mampu mengambil peran yang lebih aktif dan strategis dalam pengelolaan usaha pertanian keluarga. Ketika nilai tambah tidak lagi berakhir pada penjualan gabah mentah, melainkan ditingkatkan melalui pengolahan dan pemasaran produk jadi, maka ekonomi keluarga petani menjadi lebih tangguh terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim. Dalam jangka panjang, sinergi antara PKK dan petani akan menciptakan ekosistem pertanian yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, kemandirian ekonomi, dan ketahanan pangan daerah yang utuh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen, teman, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Haryono. (2007). *Produktivitas Usahatani Padi dan Ketersediaan Tenaga Kerja di Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka 2021*. <https://tulangbawangkab.bps.go.id/publication/2022/02/xx/yyyyyy>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Provinsi Lampung Tahun 2021*. BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pertanian Kabupaten Tulang Bawang 2021*. BPS Kabupaten Tulang Bawang.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Target Produksi Beras Nasional Tahun 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahrin, S., Alifah, S., & Mulyono, S. (2017). *Rancang Bangun Sistem Informasi Survey Pemasaran dan Penjualan Berbasis Web*, 2(2), 81–88.
- Barika, E., Ekaputri, R. A., Septriani, & Efendi. (2021). Analisis struktur ekonomi di Sumatra. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 35–48.
- Dartana, D., Nurwahidah, S., & Damayanti, F. (2024). *Kinerja Usahatani Padi Sawah di*

- Kabupaten Tulang Bawang*. *Jurnal Manajemen Agribisnis Terapan*, 2(1), 50–60.
- Dartana, H., Rukmana, R., & Yuliani, H. R. (2024). Kinerja Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Manajemen Agribisnis Terapan*, 2(1), 50–60.
- Djoh, D. A., et al. (2022). *The Role of Farmer Groups on Rice Field Productivity in Palakahembi Village, Pandawai District*. *Jurnal Ilmiah*, 9, 548–562.
- Fachruddin, L. (2008). *Membuat aneka selai*. Kanisius.
- Fauzi, N. F. (2018). Potensi dan strategi pengembangan pertanian pada kelompok tani Sumber Klopo I. *Jurnal Agribest*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.32528/agribest.v2i2.1627>
- Handayani, N. (2018). *Pengembangan Produk Kerajinan Berbasis Sumber Daya Alam Lokal*. *Jurnal Industri Kreatif*.
- Hendrikayanti, R. H., Fahmi, A. S., & Retno, A. K. (2022). Optimasi waktu pengukusan dan suhu penggorengan kerupuk ikan patin menggunakan Response Surface Methodology. *JFMR - Journal of Fisheries and Marine Research*, 6(1).
- Ikhlas, M., Rizani, A., & Supriatna, A. S. (2024). Tantangan pertanian padi dalam konteks triple helix di Kabupaten Jember. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis)*, 9(6), 591–602.
- Jurnal MODERAT. (2019). *Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran*, Volume 5, No. 2, hlm. 201–212.
- Kadma, H. O. (2017). *Peran Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 969–978.
- Khusna, K., Kurniati, R. F., Muhaimin, M., & Universitas Muhammadiyah Jember. (2019). Pengembangan model pemberdayaan petani padi melalui program hulu hilir agromaritim bidang pertanian. *Matra Pembaruan*, 3(2), 89–98. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.89-98>
- Mardikanto, T. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat: dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mawarni, E., Buruwadi, M., & Bempah, I. (2017). *Peran kelompok tani dalam peningkatan pendapatan petani padi sawah di desa Iloheluma kecamatan Tilongkabila kabupaten Bone Bolango*. *Agrinesia*, 2(1), 65–73.
- Moustapha, S., El A., & Faid, F. (2015). The beneficial effects of brown rice and its bran as natural antioxidants and lowering hyperglycemic in albino rats, *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 281–289.
- Muhammad, N. (2021). Pemberdayaan terhadap pengembangan kualitas aset SDM petani dalam meningkatkan hasil pertanian. *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.53515/aijpkm.v2i1.22>
- Munadjim. (1983). *Teknologi pengolahan pisang*. Gramedia.
- Naibaho, E. D., & Damanik, D. (2023). Analisis pengaruh sektor pertanian terhadap perekonomian di Provinsi Medan. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 244–253. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.499>
- Oktavia, Z., Darwanto, D. H., & Hartono, S. (2015). Sektor pertanian unggulan di Sumatra Selatan. *Jurnal Agraris*, 3(2), 61–69. <https://doi.org/10.18196/agr.129>
- Pakraini, A. Z. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani tentang Peranan Kelompok Tani Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Karang Anyar,*

- Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang*). Universitas Sumatera Utara Medan.
- Palungkun, R. (1993). *Aneka produk olahan kelapa*. Penebar Swadaya.
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2012). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* [Peraturan Perundang-Undangan].
- Pusat Penyuluhan Pertanian. (2012). *Laporan Evaluasi Irigasi dan Produksi Pertanian Nasional*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Ramadani, D. M. (2020). *Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Rantung, J. F., Mandey, J., & Londa, V. Y. (2018). *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Ongkau I Kabupaten Minahasa Selatan)*. *Jurnal Administrasi*.
- Rohman, T. (2020). Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember.
- Rompas, J., Engka, D., & Tolosang, K. (2015). Potensi sektor pertanian dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 124–136.
- Rukmana, R. (1999). *Usaha tani pisang*. Kanisius.
- Saleh, A. S. M., Wang, P., Wang, N., Yang, L., & Xiao, Z. (2019). Brown rice versus white rice: Nutritional quality, potential health benefits, development of food products and technologies. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 18, 1070–1096.
- Saleha, R., E, L., & M, A. (2016). *Pemberdayaan Kader PKK dalam Usaha Penyebarluasan Informasi Kesehatan Jatinangor*. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 5(1), 5–8.
- Sari, P. R. I. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Usahatani Padi Sawah. *Jurnal Agribisnis dan Hasil Pertanian*, 10(1), 1–12.
- Suarti, B., Budijanto, S., Sukarno, & Ardiansyah. (2022). Efek metode pemanasan terhadap sifat fisikokimia beras pecah kulit hitam fermentasi. *Jurnal Pangan*, 33–44.
- Sunarti, T. C., & Michael. (2013). Pemanfaatan beras pecah dan tepung-tepungan lokal untuk meningkatkan kualitas kerupuk beras. *E-Jurnal Pangan Indonesia*, 2(1).
- Susanto, T., & Sucipto, N. (1994). *Teknologi pengemasan bahan makanan*. CV Family.
- Susanto, T., & Sucipto, N. (1994). *Teknologi Pengemasan Bahan Makanan*. Blitar: CV. Family.
- Sutedjo, A. (2006). *Mengenal Penyakit Melalui Pemeriksaan Laboratorium*. Amara Books.
- Sutrisno, A. D. (2022). Kebijakan sistem ketahanan pangan daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 28–42. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4862>
- Tim Penggerak PKK Pusat. (2015). *Buku Pedoman Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.
- Tribun Lampung. (2025, April 10). *Petani di Tulangbawang Keluhkan Susah Jual Gabah ke Bulog*. *Tribun Lampung*.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

JURNAL EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS (JUEPA)

Vol. 2 No. 1 Januari 2025

e- ISSN: 3063-1920 (online)

Nasional.

Upadhyay, A., & Karn, S. K. (2018). Brown rice: Nutritional composition and health benefits. *Journal of Food Science and Technology Nepal*, 10(1), 47–52.

Wahyuningsih, N. (2018). *Strategi pengembangan usaha agroindustri kerupuk singkong dan kelembagaan di UKM kerupuk singkong Ibu Suliah, Kabupaten Pamekasan*.

Wardhani, T., & Anggraeni, F. D. (2018). Iptek bagi masyarakat kelompok usaha krupuk puli di Desa Toyomarto. *Jurnal Teknologi Pangan*, 9(1).

Wati, I. (2015). *Peranan PKK dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung*. *Jurnal Kultur Demokrasi*.

Wulandari, Y., & Achir, S. (2015). *Pengaruh Bahan Tali Rafia Asahylon Terhadap Hasil Jadi Crochet/Rajutan Pada Tas Jinjing (Corde Bag)*. *Jurnal Tata Busana*, 4(2), 66–72.

Yuliani, H. R. (2011). *Karakterisasi selai tempurung kelapa muda*. Prosiding Seminar Nasional Teknik “Kejuangan”. Yogyakarta.